

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian memegang peranan penting bagi penduduk di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan sumbangan devisa dan mendukung perkembangan sektor lainnya seperti dalam menyediakan bahan baku untuk industri. Salah satu sektor pertanian yang memegang peranan penting yaitu subsektor perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang pembudidayaannya berkembang sangat pesat yaitu kelapa sawit (Hermanto, 2018).

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama di Indonesia yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (KPO), sehingga kelapa sawit memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa Negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Hingga saat ini kelapa sawit telah diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan produk turunannya (Fauzi, 2012).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sentra pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani (KK)
2015	535.827	1.177.560	2,863	172.939
2016	791.025	1.552.543	2,722	210.684
2017	1.039.920	1.683.532	2,055	213.021
2018	1.079.334	1.813.870	2,124	221.711
2019	1.041.434	1.830.035	3,008	228.457

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada produksi dari tahun 2015 sampai tahun 2019, sedangkan untuk luas areal kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Produktivitas kelapa sawit di Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi dengan jumlah produktivitas tertinggi menurut Tabel 1 terdapat pada Tahun 2019 dengan produktivitas sebesar 3,008 Ton/Ha.

Pengembangan luas areal dan jumlah produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi tidak terlepas dari perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit di kabupaten yang mengusahakan tanaman perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi. Adapun luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Provinsi Jambi menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2019

Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Batanghari	10.887	41.824	393	53.094	141.965	3,394	24.564
Muaro Jambi	13.561	89.964	31.754	135.279	232.725	2,587	61.842
Bungo	22.408	26.427	12.373	61.208	100.696	3,810	21.462
Tebo	14.944	40.193	5.536	60.673	129.170	3,214	18.866
Merangin	11.271	31.735	24.999	68.005	211.978	6,680	42.441
Sarolangun	9.661	22.439	5.091	37.191	54.271	2,419	21.039
Tanjab Barat	18.978	42.704	11.112	72.794	119.671	2,802	26.591
Tanjab Timur	-	28.541	5.331	33.872	47.806	1,675	11.609
Kerinci	70	19	5	94	10	0,52	43
Jumlah/ Rata-rata	101.770	323.846	96.594	522.210	1.038.292	3,206	228.457

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2 yang merupakan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat bahwa Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit terluas ke-empat di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Merangin. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bungo yaitu sebesar 61.208 Ha dengan Produksi sebesar 100.696 Ton, diikuti dengan produktivitas tertinggi ke-dua setelah Kabupaten Merangin yaitu sebesar 3,810 Ton/Ha.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menerima sertifikasi ISPO, yang mana terdapat empat kabupaten yang telah menerima sertifikasi ISPO di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lampiran 2). Kabupaten Bungo merupakan kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang menerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dari ke-empat

kabupaten yang telah menerima sertifikasi ISPO yaitu diterima pada Tahun 2017. Kelapa sawit di Kabupaten Bungo juga merupakan perkebunan kelapa sawit eks-plasma PIR-TRANS dan KKPA. Adapun luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Bungo menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Bungo Tahun 2019

Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Tanah Tumbuh	180	887	20	1.087	1.011	1,140	442
Batin II	50	596	20	666	855	1,435	435
Pelayang							
Rantau Pandan	4.115	798	27	4.940	1.331	1,668	1.611
Batin III Ulu	306	142	-	448	567	3,993	418
Pasar Muara	4	12	-	16	33	2,750	22
Bungo							
Batin III	132	126	-	258	378	3,000	100
Rimbo Tengah	211	466	56	733	1.718	3,687	184
Bungo Dani	18	63	-	81	289	4,587	18
Jujuhan	374	522	5	901	2.886	5,529	425
Jujuhan Ilir	127	238	-	365	519	2,181	142
Tanah Sepenggal	185	1.005	60	1.250	3.842	3,823	404
Tanah Sepenggal	51	57	-	108	185	3,246	107
Lintas							
Pelepat	11.418	5.839	541	17.798	19.464	3,333	5.936
Pelepat Ilir	949	7.581	5.833	14.363	48.334	6,376	4.335
Limbur Lubuk	2.560	3.355	5.800	11.715	11.232	3,348	4.823
Mengkuang							
Muko-Muko	760	972	-	1.732	1.563	1,608	623
Batin VII							
Batin II Babeko	968	3.768	11	4.747	6.489	1,722	1.437
Jumlah/ Rata-rata	22.408	26.427	12.373	61.208	100.696	3,810	21.462

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Pelepat Ilir memiliki luas areal sebanyak 14.363 Ha dengan produksi sebesar 48.334 Ton. Diikuti dengan produktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu sebesar 6,376 Ton/Ha dan jumlah petani kelapa

sawit di Kecamatan Pelepat ilir yaitu sebanyak 4.335 KK. Selain itu, Kecamatan Pelepat Ilir merupakan satu-satunya kecamatan yang sudah menerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) di Kabupaten Bungo (Lampiran 1). Untuk jumlah kelompok tani dan petani di Kecamatan Pelepat Ilir menurut Desa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kelompok Tani dan Petani Kelapa Sawit Menurut Desa di Kecamatan Pelepat Ilir Tahun 2019

Desa	Kelompok Tani	Petani
Purwo sari	44	902
Lembah Kuamang	27	423
Sumber Harapan	34	720
Daya Murni	28	672
Sumber Mulya	14	242
Maju Jaya	30	590
Tirta Mulya	43	916
Lingga Kuamang	31	772
Bangun Harjo	31	639
Kuning Gading	29	581
Kuamang Jaya	19	327
Karya Harapan Mukti	24	472
Koto Joyo	4	85
Padang Palangeh	3	75
Danau	1	21
Lubuk	6	154
Muara Kuamang	3	66
Jumlah	371	7.657

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2020

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa Desa Karya Harapan Mukti merupakan desa dengan jumlah kelompok tani sebanyak 24 kelompok tani dan jumlah petani sebanyak 472 petani. Desa Karya Harapan Mukti merupakan satu-satunya desa yang menerima sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) pada Tahun 2017 di

Kabupaten Bungo khususnya di Kecamatan Pelepat Ilir dan diterima oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti. Kelompok tani yang tergabung di Koperasi Unit Desa Karya Mukti yaitu sebanyak 24 kelompok tani. Terdapat 9 kelompok tani yang bersertifikasi ISPO dan 15 kelompok tani yang tidak bersertifikasi ISPO (Lampiran 2).

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dibentuk pada Tahun 1986. Secara struktur KUD Karya Mukti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Pemeriksa serta Anggota Karyawan. Petani kelapa sawit yang tergabung pada KUD Karya Mukti merupakan petani kelapa sawit eks plasma PIR TRANS dan KKPA yang bermitra dengan PT. Sari Aditya Loka 2. Program ini telah berakhir pada tahun 2009 untuk program KKPA antara petani dan PT. SAL 2, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak juga selesai.

Peran KUD Karya Mukti dalam hal ini membantu petani dalam kredit koperasi berupa simpan-pinjam untuk kebutuhan tertentu seperti pupuk, sarana produksi sampai dengan dana konsumtif, serta KUD juga memberikan informasi-informasi terkait isu kelapa sawit kepada petani. KUD Karya Mukti juga berperan membantu petani dalam pendampingan teknis kebun dan memfasilitasi kebutuhan petani seperti infrastruktur dan membantu petani dalam mengurus perizinan yang sulit untuk dilakukan petani seorang diri. KUD Karya Mukti juga berperan dalam membantu petani kelapa sawit dalam pembelian atau penjualan TBS. Dalam proses penjualan kembali hasil TBS yang dibeli dari petani, KUD Karya Mukti bekerja sama dengan PT. Sari Aditya Loka (SAL) 2. KUD Karya Mukti hanya mengambil Rp. 10,- per kg dari setiap pencairan dana TBS kepada petani. Namun, ada juga petani Non

ISPO yang menjual hasil produksi kelapa sawitnya kepada tengkulak terdekat yang mana dalam penjualan hasil produksi TBS kelapa sawit petani tidak terikat dengan KUD jadi petani bebas untuk menjual hasil produksi kelapa sawitnya ke tengkulak atau langsung menjual ke perusahaan.

Sertifikasi ISPO sulit diterapkan bagi petani terutama bagi petani eks plasma yang telah mengelola kebun kelapa sawitnya secara mandiri atau swadaya. Oleh karena hal itu perlu dilakukan kerjasama antara petani melalui KUD dengan perusahaan perkebunan dan lembaga pendukung lainnya sebagai mitra untuk membantu petani dalam mengimplementasikan ISPO. Kerjasama ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien. Pendanaan ISPO sendiri berasal dari PT. Astra dan sebagian berasal dari pendapatan yang dihasilkan Koperasi di KUD Karya Mukti. Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, petani harus melampirkan surat izin usaha perkebunan dan hak atas tanah seperti STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dan Dokumen Hak Atas Tanah (SHM).

Kelebihan dari petani yang bersertifikasi ISPO yaitu petani kelapa sawit ISPO lebih menerapkan *good agricultural practices* dan prinsip ISPO terkait isu lingkungan yang dapat diartikan dalam manajemen atau pengelolaan perkebunan kelapa sawitnya, petani melakukan kegiatan usahatani dengan sistem ramah lingkungan dengan mengikuti kaidah AMDAL sehingga tidak akan merusak lingkungan sekitar lainnya selama melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Selain itu, petani ISPO juga unggul dalam legalitas kebun, legalitas benih, dan pengetahuan

petani tentang pengelolaan lingkungan yang benar. Hal ini karena dengan menerapkan prinsip-prinsip ISPO dan manajemen kebun yang terencana maka hasil Tandan Buah Segar yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Dengan adanya sertifikasi ISPO, petani mengharapkan harga dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak bersertifikasi ISPO, sehingga akan mendapatkan penerimaan serta pendapatan yang akan tinggi pula. Namun pada kenyataannya di lapangan berdasarkan informasi yang di dapat dari ketua KUD Karya Mukti bahwa tidak terdapat perbedaan harga yang diterima oleh petani ISPO dan Non ISPO. Harga dari perusahaan sama untuk seluruh petani yang menjual ke perusahaan karena produksi TBS pekebun dijual kepada perusahaan berpedoman kepada harga yang disepakati kedua belah pihak dan tergantung kemana petani akan menjual produksi TBS yang dihasilkan.

Petani ISPO dalam memasarkan hasil TBS kelapa sawitnya menjual ke KUD sedangkan petani Non ISPO lebih banyak menjual ke tengkulak dengan harga lebih rendah walaupun petani Non ISPO juga merupakan anggota KUD. Hal ini karena petani Non ISPO lebih memilih berhutang ke tengkulak karena proses yang lebih mudah dan cepat dibandingkan di KUD sehingga petani Non ISPO lebih terikat dengan tengkulak dan harus menjual hasil panen kelapa sawit ke tengkulak. Selain itu tengkulak juga menjual pupuk bersubsidi untuk petani dan juga boleh berhutang agar mempermudah petani anggotanya.

Produksi yang dihasilkan petani kelapa sawit ISPO berbeda dengan petani Non ISPO, karena terdapat surveilen terhadap petani ISPO sehingga kegiatan usahatani

kelapa sawit ISPO harus dikelola sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Pada prinsip dan kriteria ISPO pekebun melaksanakan penanaman sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP), seperti pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), pemanenan, pengangkutan buah, penjualan serta kesepakatan harga TBS, dan lainnya yang tercantum dalam prinsip dan kriteria ISPO (Lampiran 4). ISPO lebih menekankan terhadap lingkungan sehingga petani ISPO akan lebih memperhatikan aspek lingkungan dengan tidak menggunakan pestisida yang tidak berlebihan agar tidak merusak lingkungan. Sedangkan petani Non ISPO dalam pengelolaan kebunnya dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki petani, karena petani yang tidak bersertifikasi ISPO tidak terdapat surveilen seperti petani ISPO. Sehingga petani Non ISPO dalam kegiatan usahatani kelapa sawitnya dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan dana yang dimiliki petani.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Bersertifikasi ISPO dan Non ISPO pada KUD Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo”**

1.2 Perumusan Masalah

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang diunggulkan hingga saat ini di Kabupaten Bungo khususnya Kecamatan Pelepat Ilir di Desa Karya Harapan Mukti. Hal ini dibuktikan dengan produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Pelepat

Ilir paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bungo, sehingga petani menjadikan usahatani kelapa sawit sebagai sentra pendapatan bagi ekonominya. Petani kelapa sawit di Kabupaten Bungo juga menerima sertifikasi ISPO khususnya di Kecamatan Pelepat Ilir di Desa Karya Harapan Mukti dan diterima oleh KUD Karya Mukti pada Tahun 2017 yang mana merupakan kabupaten pertama yang menerima sertifikasi ISPO di Provinsi Jambi. Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, petani harus memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah seperti STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dan Dokumen Hak Atas Tanah (SHM). Oleh karena adanya sertifikasi ISPO diyakini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan usahatani kelapa sawit dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Petani kelapa sawit ISPO mengusahakan kelapa sawit secara intensif sesuai pedoman pada prinsip dan kriteria ISPO, seperti pemberian pupuk dan obat-obatan sesuai takaran dan tidak berlebihan, pemanenan dengan cara yang benar, pemasaran dan penjualan TBS. Sedangkan petani Non ISPO mengusahakan kelapa sawitnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki petani selama melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit karena petani Non ISPO tidak terikat seperti petani ISPO yang harus mematuhi prinsip dan kriteria ISPO. Pengelolaan usahatani kelapa sawit ISPO dan Non ISPO tentunya ditentukan dalam berbagai aspek salah satunya produksi dan kualitas TBS yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan usahatani. Pendapatan yang diterima petani dapat

dipengaruhi oleh penggunaan biaya dan harga jual TBS yang berbeda antara petani ISPO dan Non ISPO.

Analisis pendapatan digunakan untuk menggambarkan keadaan usahatani kelapa sawit di Kecamatan Pelepat Ilir sehingga dapat di lihat seberapa besar pendapatan usahatani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO agar mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO Anggota Koperasi Unit Desa Karya Mukti di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo?
2. Berapa pendapatan usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO pada Koperasi Unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo?
3. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dengan Non ISPO?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO Anggota Koperasi Unit Desa Karya Mukti di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
2. Menganalisis pendapatan usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO pada Koperasi Unit Desa di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
3. Menganalisis perbedaan pendapatan usahatani kelapa sawit petani bersertifikasi ISPO dan Non ISPO.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak selanjutnya yang membutuhkan.
3. Sebagai bahan pustaka dalam menambah ilmu pengetahuan atau pembandingan untuk penelitian berikutnya untuk bisa melakukan penelitian serupa atau sejenis.